



Pansus Minta Bupati Tindaklanjuti Temuan BPK

■ Sidang Paripurna Ranperda Pertanggung Jawaban APBD 2013

SIAK, TRIBUN - Bupati Siak diminta untuk segera tindaklanjuti tujuh item rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau yang tercantum

dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Siak tahun 2013. Surat BPK Perwakilan Provinsi Riau yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Siak.

Demikian diungkapkan Ketua Pansus Suhartono SH, saat membacakan laporan hasil kerja Pansus terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun

Anggaran 2013, dalam sidang paripurna di Ruang Panggilama Gimbam, Gedung DPRD Siak, Selasa (8/7).

Hadir pada kesempatan itu Bupati Siak H Syamsuar.

Hanya saja, dalam rekomendasi itu Pansus tidak menjabarkan secara rinci apa saja tujuh item dari BPK Perwakilan Riau yang dimaksud tersebut. Namun, kuat dugaan jika tujuh item itu, berkaitan dengan beberapa temuan dari BPK terhadap hasil audit Laporan Ke-

uangan APBD Siak tahun 2013.

Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus kemarin memang berdasarkan pada hasil audit dari BPK Perwakilan Riau, misalnya temuan BPK terhadap pengelolaan aset.

Terhadap temuan BPK, Pansus meminta Bupati segera memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu, pengelolaan pajak, perkotaan dan desa, dan berapa perolehan tanah, serta pengelolaan penanganan aset terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Siak.

Bupati juga diminta untuk menindaklanjuti terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Perda atas penyertaan modal berupa aset

Pansus juga menyoroti tentang buruknya kinerja dari sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta merekomendasikan kepada Bupati untuk segera melakukan evaluasi terhadap BUMD yang kinerjanya kurang baik dan tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Siak, yakni BUMD PD Sarana Pembangunan Siak (SPS), PT KITB, dan PT SPE.

Selain itu, dalam laporan pansus yang dibacakan itu, berkaitan dengan hasil pembahasan bersama antara pansus dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pemkab Siak tahun anggaran 2013, terlihat gambaran struktur keuangan tahun 2013 dengan rincian, total APBD Kabupaten Siak 2013 sebesar Rp 2.682.367.9987.279.-39. Dengan total realisasi APBD sebesar Rp. 2.285.374.-036.987.60.

Dari total pendapatan sendiri pada tahun 2013 yaitu, Rp 2.273.786.289.905.72, sumber pendapatan terbesar masih berasal dari dana perimbangan sebesar Rp 1. 768.816.719. Sedangkan sumber pendapatan lainnya, yakni dari Pendatan Asli Daerah (PAD) Rp 348.618.-

602.282,72 dan pendapatan lainnya yang syah sebesar Rp 156.4500.967.803.

Untuk total belanja anggaran tahun 2013 sebesar Rp 2.285.374.036.987.60, dengan rincian belanja operasional dengan total Rp 1.481.991.580.-663,60, sementara untuk belanja modal sendiri yaitu mencapai Rp 803.328.618.824,00. Anggaran tahun 2013 mengalami defisit sebesar Rp 11.587.-747.081,86.

Dari sisi total pembiayaan penerimaan diperoleh anggaran sebesar Rp. 923.457.582.-685,10. Dari struktur anggaran itu, diketahui bahwa total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaaan (SiLPA) sebesar Rp 911.869.835.603,22.

Ketua DPRD Siak, Zulfi Murshal usai sidang menuturkan, beberapa temuan BPK memang menjadi sorotan dari Pansus. Ada beberapa item yang menjadi temuan, dan menjadi rekomendasi dari BPK. Selain temuan dari laporan keuangan, juga ada temuan BPK lainnya yang menyangkut aset. "Temuan dari BPK hanya sebatas rekomendasi kepada beberapa SKPD. Ada yang berupa administrasi dan ada yang berupa pengembalian anggaran dari SKPD terkait. Untuk pengembalian itu, sudah ada SKPD yang mengembalikan dengan cara mengangsurnya,"terang Zulfi.

Berkaitan dengan tingginya SiLPA tahun anggaran 2013, Zulfi mengatakan, jumlah SiLPA tersebut merupakan hasil audit dari BPK. Ia menilai tingginya SiLPA merupakan bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Siak. Namun di sisi lain, tingginya SiLPA juga dikarenakan banyaknya program dari sejumlah SKPD yang tidak berjalan dengan baik. "Ini merupakan bentuk rendahnya kinerja dari SKPD dilingkungan Pemkab Siak. Oleh karena itu, kita minta kepada Pemkab untuk dapat memperbaiki kinerja dari SKPD,"ungkapnya. (cr5)